

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatra, Indonesia dan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi ini terdiri dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Selat Bangka memisahkan antara Pulau Sumatra dan Pulau Bangka, sedangkan Selat Gaspar memisahkan antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari tujuh pemerintah daerah yaitu pemerintah Kota Pangkalpinang dan enam kabupaten yaitu di antaranya ada Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki banyak sumber daya kelautan dan perikanan karena lokasinya yang strategis di antara arus Selat Malaka dan Laut Cina Selatan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2024).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) luas total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 81.725,06 km², yang terdiri dari daratan seluas sekitar 16.424,06 km² (20,10%) dan lautan seluas sekitar 65.301 km² (79,90%). Kondisi geografis wilayah ini didominasi oleh dataran rendah, lembah, serta sebagian kecil pegunungan dan perbukitan, dengan ketinggian dataran yang bervariasi. Jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 1.511.899 ribu jiwa pada Tahun 2024. Provinsi ini terkenal sebagai penghasil timah dan perekonomiannya bergantung pada pertambangan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga terkenal karena pantai-pantainya yang indah dan keragaman etnisnya yang masih terjaga.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Perkembangan Variabel Penelitian

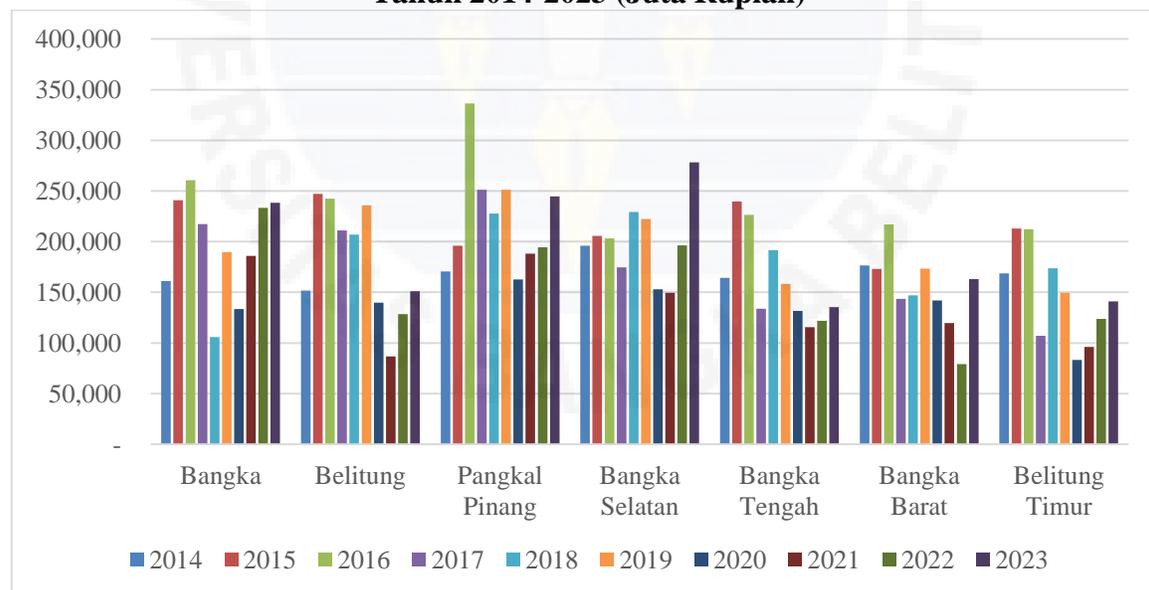
Penelitian ini melibatkan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi hasil dari adanya variabel independen (bebas). Penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi

Khusus (DAK) Fisik, sedangkan variabel dependen yaitu Belanja Modal kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut perkembangan masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

4.2.1.1 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas serta manfaat dari aset tersebut. Tujuan pengadaan aset ini bukanlah untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau meningkatkan layanan publik. Belanja modal sangat penting untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik. Belanja modal untuk pelayanan publik merupakan pengeluaran yang dialokasikan untuk membiayai investasi dalam bentuk penambahan aset, dengan tujuan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat (Nurhidayati dan Yaya, 2013). Berikut merupakan belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Grafik 4.1 Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2023 (Juta Rupiah)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025 (Data Diolah)

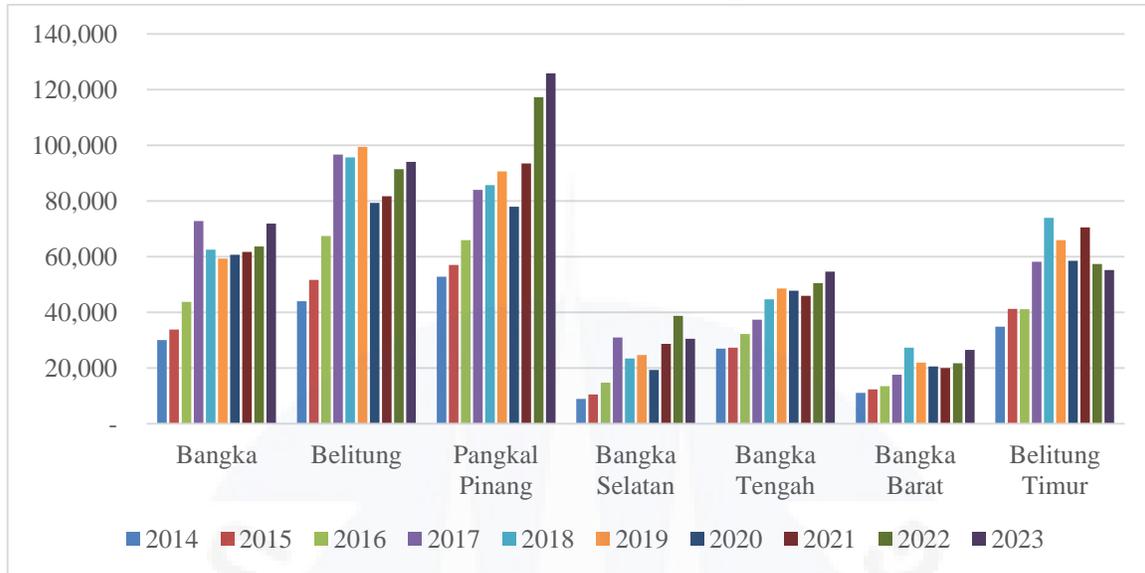
Berdasarkan pada Grafik 4.1 menunjukkan bahwa belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2023

mengalami *fluktuasi* selama sepuluh tahun terakhir. Belanja modal tertinggi pada kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di Kota Pangkalpinang dengan jumlah Rp336,343 Juta Rupiah pada Tahun 2016, hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Pangkalpinang memfokuskan belanja modal pada pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, fasilitas umum, serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Meningkatnya belanja modal akan berdampak pada masa mendatang, ketika produktivitas masyarakat akan meningkat serta jumlah investor yang masuk akan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Apriana & Suryanto, 2010). Sementara itu, belanja modal terendah terdapat pada Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp79,178 Juta Rupiah pada Tahun 2022.

4.2.1.2 Pajak Daerah

Setiap daerah memiliki dasar penetapan pajak yang berbeda-beda, bergantung pada kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Di daerah dengan kondisi perekonomian yang baik pajak yang diperoleh cenderung lebih besar. Namun, di daerah yang tertinggal pemerintah daerah hanya mampu memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Pajak Daerah adalah pembayaran yang harus dilakukan oleh individu atau organisasi kepada daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ini dilakukan tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan dana yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan daerah dan kesejahteraan umum. Di sini, fungsi utama pajak adalah untuk memberikan pendapatan yang paling besar kepada pemerintah, yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah (Trisnani dan Isthika, 2022). Berikut merupakan paja daerah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Grafik 4.2 Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2023 (Juta Rupiah)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025 (Data Diolah)

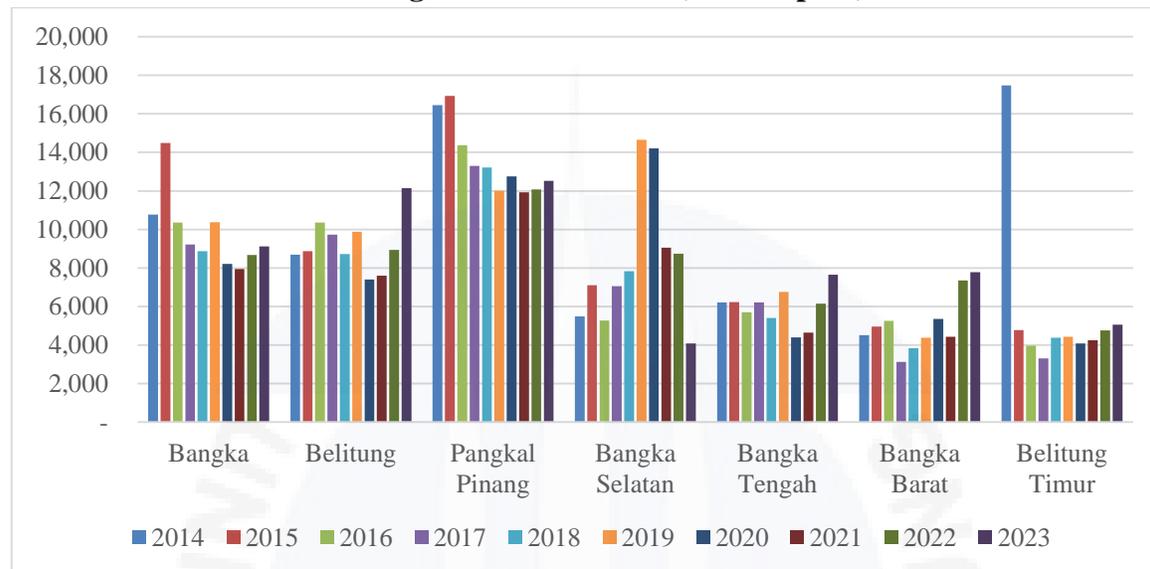
Berdasarkan pada Grafik 4.2 menunjukkan bahwa Pajak Daerah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan selama sepuluh tahun terakhir. Pajak Daerah tertinggi pada kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di Kota Pangkalpinang dengan jumlah Rp125,800 Juta Rupiah pada Tahun 2023, hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Pangkalpinang melaksanakan beberapa upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah seperti pemasangan alat perekam transaksi, kerjasama dengan Tokopedia dan Indomaret, serta penagihan piutang melalui Kejaksaan. Dan kemudian Pajak Daerah terendah terdapat pada Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp8,945 Juta Rupiah pada Tahun 2014.

4.2.1.3 Retribusi Daerah

Untuk mendanai perekonomian daerah pemerintah memanfaatkan pendapatan yang berasal dari sumber daya daerahnya sendiri. Upaya percepatan pembangunan dan kemajuan daerah dilakukan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan adalah Retribusi Daerah, yang mencerminkan hasil dari pemungutan biaya atas layanan tertentu kepada masyarakat

(Mulatsih dkk, 2022). Berikut merupakan retribusi daerah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Grafik 4.3 Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2023 (Juta Rupiah)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025 (Data Diolah)

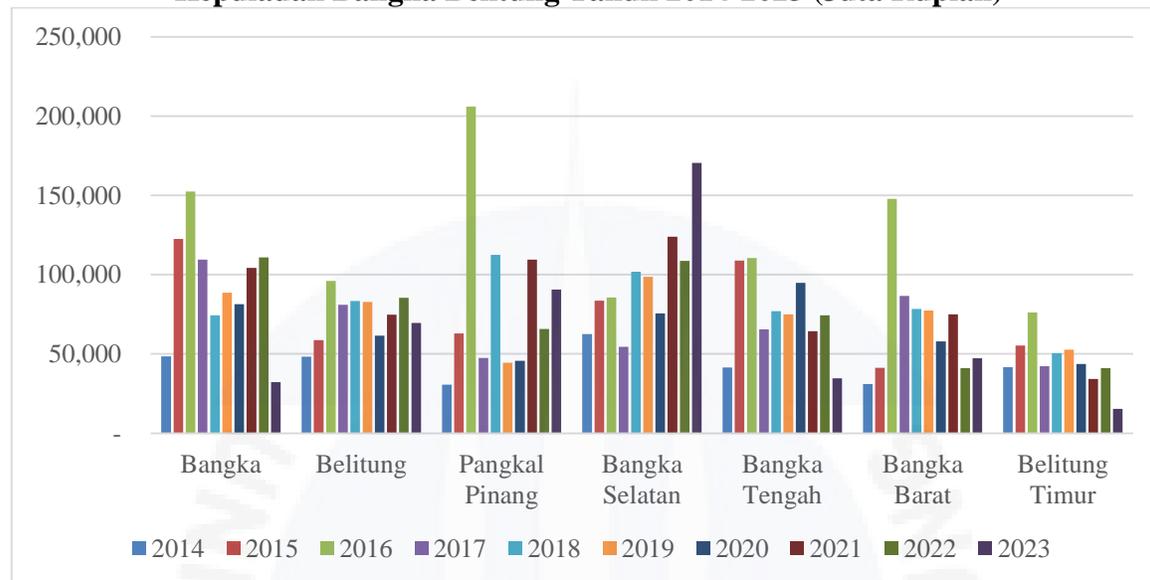
Berdasarkan pada Grafik 4.3 menunjukkan bahwa retribusi daerah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2023 mengalami *fluktuasi* selama sepuluh tahun terakhir. Retribusi daerah tertinggi pada kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di Kabupaten Belitung Timur dengan jumlah sebesar Rp17,480 Juta Rupiah pada Tahun 2014, hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Perubahan regulasi ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang baru, yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pendapatan daerah, termasuk retribusi. Selanjutnya retribusi daerah terendah terdapat pada Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp3,119 Juta Rupiah pada Tahun 2017.

4.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Salah satu jenis Transfer Ke Daerah (TKD) yaitu adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dialokasikan untuk membantu pemda menyediakan infrastruktur yang

memenuhi standar layanan dan prioritas nasional (Mulyadi, 2022). Berikut merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Grafik 4.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2023 (Juta Rupiah)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan pada Grafik 4.4 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2023 mengalami *fluktuasi* selama sepuluh tahun terakhir. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tertinggi pada kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di Kota Pangkalpinang dengan jumlah sebesar Rp206,070 Juta Rupiah pada Tahun 2016 dan kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terendah berada di Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp15,453 Juta Rupiah pada Tahun 2023.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Pemilihan model dalam penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Untuk menentukan model yang paling sesuai, dilakukan pengujian dengan menggunakan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji *Lagrange Multiplier*.

4.3.1.1 Uji Chow

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang lebih sesuai digunakan dalam estimasi data panel. Jika hasil uji chow nilai *probability F* $< 0,05$ maka model terbaik yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Sedangkan jika hasil uji chow nilai *probability F* $> 0,05$ maka model terbaik yang digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM).

Tabel 4.1 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	1.338012	(6,60)	0.2546
Cross-section Chi square	8.790310	6	0.1857

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa hasil uji chow diperoleh probabilitas pada *cross-section F* sebesar 0,2546 dengan tingkat signifikan $\alpha = 5$ persen (0,05). Nilai probabilitas $0,2546 > 0,05$ menunjukkan bahwa keputusan model terbaik yang digunakan dari hasil uji chow adalah *Common Effect Model* (CEM).

4.3.1.2 Uji Hausman

Setelah melakukan uji chow dengan hasil model terbaik yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM), maka selanjutnya dilakukan uji hausman. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah *Random Effect Model* (REM) atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang lebih sesuai digunakan dalam estimasi data panel. Jika hasil uji hausman nilai *probability F* $< 0,05$ maka model terbaik yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Sedangkan jika hasil uji hausman nilai *probability F* $> 0,05$ maka model terbaik yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).

Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob
Cross-section random	7.180231	3	0.0664

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025 (Data Diolah)

Pada Tabel 4.2 hasil uji hausman diperoleh nilai probabilitas pada *cross-section* random sebesar $0,0664 > 0,05$ menunjukkan bahwa keputusan model terbaik yang digunakan dari hasil uji hausman adalah *Random Effect Model* (REM).

4.3.1.3 Uji Lagrange Multiplier

Setelah melakukan uji hausman dengan hasil model terbaik yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM), maka selanjutnya dilakukan uji *Lagrange Multiplier*. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang lebih sesuai digunakan dalam estimasi data panel. Jika hasil uji *lagrange multiplier* nilai *probability F* $< 0,05$ maka model terbaik yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Sedangkan jika hasil uji *lagrange multiplier* nilai *probability F* $> 0,05$ maka model terbaik yang digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM).

Tabel 4.3 Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-Section	Time	Both
Breusch-pagan	0.991866 (0.3193)	23.78454 (0.0000)	24.77641 (0.0000)

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025 (Data Diolah)

Tabel 4.3 menunjukkan hasil uji *lagrange multiplier* diperoleh nilai probabilitas pada *cross-section* breusch-pagan sebesar 0,3193 dengan tingkat signifikan $\alpha = 5$ persen (0,05). Nilai probabilitas $0,3193 > 0,05$ menunjukkan bahwa keputusan model terbaik yang digunakan dari hasil uji *lagrange multiplier* adalah *Common Effect Model* (CEM).

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Hasil dari uji asumsi klasik penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah data yang digunakan dalam penelitian memiliki distribusi secara normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji

Jarque-Bera (JB) dan kriteria pengujian ini menyatakan bahwa data dianggap berdistribusi normal jika nilai probabilitas $> 0,05$.

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Nilai
Probability	0.166397

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan nilai probabilitas hasil uji normalitas sebesar $0,166397 > 0,05$ yang menunjukkan data berdistribusi normal. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.3.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Untuk mendeteksi keberadaan multikolinieritas dalam model regresi, dapat dilakukan dengan menganalisis nilai *Tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Multikolinieritas terdeteksi jika nilai VIF > 10 dan toleransi > 80 . Sebaliknya, multikolinieritas tidak ada apabila nilai VIF < 10 dan toleransi < 80 .

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas

	LOGPD	LOGRD	LOGDAKF
LOGPD	1.000000	0.38317149	-0.0188159
LOGRD	0.38317149	1.000000	0.15776580
LOGDAKF	-0.0188159	0.15776580	1.000000

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.5 uji multikolinieritas menunjukkan hasil bahwa setiap variabel independen dalam penelitian mendapat nilai korelasi < 80 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas dalam penelitian ini.

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memeriksa apakah dalam model regresi terdapat perbedaan *variance* antar pengamatan lainnya. Adapun kriteria metode *glejser* adalah jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka terjadi heterokedastisitas. Akan tetapi, jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.376358	1.350309	1.019291	0.3118
LOGPD	0.045444	0.031564	1.439751	0.1547
LOGRD	-0.062269	0.045631	-1.364627	0.1770
LOGDAKF	-0.035229	0.040357	-0.872916	0.3859

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025 (Data Diolah)

Pada Tabel 4.6 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan hasil bahwa setiap variabel dalam penelitian mendapat nilai probabilitas lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

4.3.3 Estimasi Model

Estimasi model digunakan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi khusus (DAK) fisik terhadap belanja modal di Povinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan model sebagai berikut:

$$\text{LOGBM}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LOGPD}_{it} + \beta_2 \text{LOGRD}_{it} + \beta_3 \text{LOGDAKF}_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (1)$$

4.3.3.1 Regresi Linear Berganda Data Panel

Berdasarkan hasil uji estimasi model regresi data panel yaitu uji chow, uji hausman, dan uji *lagrange multiplier* yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang digunakan dalam peneitian adalah *Common Effect Model* (CEM).

Tabel 4.7 Hasil Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.92131	2.256779	6.611772	0.0000
LOGPD	-0.051739	0.052753	-0.980774	0.3303
LOGRD	0.251827	0.076263	3.302084	0.0016
LOGDAKF	0.260285	0.067449	3.858969	0.0003

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.7 hasil regresi linear berganda persamaannya adalah sebagai berikut:

$$\text{LOGBM}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LOGPD}_{it} + \beta_2 \text{LOGRD}_{it} + \beta_3 \text{LOGDAKF}_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (1)$$

$$\text{LOGBM}_{it} = 14,92 - 0,05\text{LOGPD}_{it} + 0,25\text{LOGRD}_{it} + 0,26\text{LOGDAKF}_{it} \dots\dots\dots (2)$$

Penjelasan dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada saat nilai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bernilai 0 (nol), maka Belanja Modal bernilai sebesar 14,92 persen.
2. Nilai koefisien Pajak Daerah sebesar -0,05 artinya jika nilai Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar satu persen, sementara itu nilai Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tetap, maka nilai Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,05 persen.
3. Nilai koefisien Retribusi Daerah sebesar 0,25 artinya jika nilai Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar satu persen, sementara itu nilai Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tetap, maka nilai Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,25 persen.
4. Nilai koefisien Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 0,26 artinya jika nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami kenaikan sebesar satu persen, sementara itu nilai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap, maka nilai Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,26 persen.

4.4 Uji Hipotesis

4.4.1 Uji T (Parsial)

Pengujian parsial atau uji t bertujuan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen.

Tabel 4.8 Hasil Uji T (Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.92131	2.256779	6.611772	0.0000
LOGPD	-0.051739	0.052753	-0.980774	0.3303
LOGRD	0.251827	0.076263	3.302084	0.0016
LOGDAKF	0.260285	0.067449	3.858969	0.0003

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025 (Data Diolah)

Pada Tabel 4.8 hasil uji t (parsial) dari masing-masing variabel dapat diuraikan sebagai berikut:

1. H₁: Pajak Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - a. Nilai t_{hitung} $-0,980774$ menunjukkan bahwa semakin besar nilai Pajak Daerah akan menurunkan Belanja Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - b. Nilai t_{tabel} dengan tingkat signifikan (0,05) atau 5 persen dan derajat bebas (df) = (n-k) atau (70-4) maka nilai tabel diperoleh sebesar 1,99656.
 - c. Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,980774 < 1,99656$).
 - d. Nilai probabilitas Pajak Daerah sebesar $0,3303 > 0,05$.
 - e. Pajak Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. H₂: Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - a. Nilai t_{hitung} $3,302084$ menunjukkan bahwa semakin besar nilai Retribusi Daerah akan meningkatkan Belanja Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - b. Nilai t_{tabel} dengan tingkat signifikan (0,05) atau 5 persen dan derajat bebas (df) = (n-k) atau (70-4) maka nilai tabel diperoleh sebesar 1,99656.
 - c. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,302084 > 1,99656$).
 - d. Nilai probabilitas Retribusi Daerah sebesar $0,0016 < 0,05$.
 - e. Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. H₃: Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - a. Nilai t_{hitung} $3,858969$ menunjukkan bahwa semakin besar nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik akan meningkatkan Belanja Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - b. Nilai t_{tabel} dengan tingkat signifikan (0,05) atau 5 persen dan derajat bebas (df) = (n-k) atau (70-4) maka nilai tabel diperoleh sebesar 1,99656.
 - c. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,858969 > 1,99656$).
 - d. Nilai probabilitas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar $0,0003 < 0,05$.

- e. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.4.2 Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menentukan apakah semua variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.9 Uji F (Simultan)

R-squared	0.322467	Mean dependent var	25.87498
Adjusted R-squared	0.291670	S.D. dependent var	0.302592
S.E. of regression	0.254669	Akaike info criterion	0.157739
Sum squared resid	4.280509	Schwarz criterion	0.286225
Log likelihood	-1.520882	Hannan-Quinn criter.	0.208775
F-statistic	10.47075	Durbin-Watson stat	1.269623
Prob(F-statistic)	0.000010		

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.9 terdapat hasil uji f (simultan), analisis dari uji tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Nilai F_{hitung} 10,47075, menunjukkan bahwa semakin besar nilai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maka akan meningkatkan Belanja Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Nilai F_{tabel} dengan tingkat signifikan (0,05) atau 5 persen dan derajat pembilang ($k-1$) atau $(4-1) = 3$ dan penyebut ($n-k$) atau $(70-4) = 66$. Maka nilai F_{tabel} sebesar 2,74371.
- Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($10,47075 > 2,74371$).
- Nilai probabilitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar $0,00 < 0,05$.
- Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Uji ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.322467	Mean dependent var	25.87498
Adjusted R-squared	0.291670	S.D. dependent var	0.302592

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025 (Data Diolah)

Pada Tabel 4.10 didapatkan hasil uji koefisien determinasi dari nilai *Adjusted R-squared* memperoleh nilai sebesar 0,291670. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mampu menjelaskan variasi variabel Belanja Modal sebesar 29 persen, sisanya 71 persen dipengaruhi oleh faktor variabel lain diluar penelitian ini.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan dari hasil olah data regresi linear berganda data panel didapatkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,980774 < 1,99656$) dan nilai probabilitas Pajak Daerah sebesar $0,3303 > 0,05$ dengan nilai koefisien Pajak Daerah sebesar $-0,051739$. Maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika nilai Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar satu persen, maka nilai Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar $0,051739$ persen.

Hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis dimana seharusnya pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, akan tetapi hasilnya menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan pajak daerah pada umumnya digunakan untuk membiayai belanja rutin. Ketika penerimaan pajak daerah meningkat, pemerintah daerah cenderung memanfaatkannya terlebih dahulu untuk menutupi belanja operasional, sehingga alokasi anggaran untuk belanja modal menjadi terbatas. Selain itu, peningkatan pajak

daerah tidak selalu diiringi dengan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, sehingga potensi dana yang sebenarnya dapat diarahkan untuk pembangunan infrastruktur justru tergerus oleh kebutuhan belanja rutin. Belanja rutin memiliki sifat jangka pendek dan tidak produktif secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, berbeda dengan belanja modal yang lebih berorientasi pada pembangunan jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap belanja rutin ini mengakibatkan alokasi anggaran untuk belanja modal menjadi terbatas, sehingga peningkatan pajak daerah tidak serta-merta berdampak pada peningkatan belanja modal.

Pada akhirnya, kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan belanja modal menjadi tidak optimal. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, di mana orientasi belanja masih lebih condong pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek dibandingkan investasi jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam kebijakan fiskal daerah termasuk peningkatan anggaran, transparansi, serta alokasi yang lebih proporsional antara belanja operasional dan belanja modal agar penerimaan pajak daerah benar-benar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan fiskal yang berorientasi jangka panjang dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan strategis seperti infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Dengan demikian, peran pajak daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan dapat lebih maksimal dan belanja modal sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan secara signifikan dan berkelanjutan.

Penelitian (Ameilia dan Syaifuddin, 2022) mendukung hasil penelitian ini yang menjelaskan bahwa pajak daerah tidak mempengaruhi belanja modal. Dengan kata lain, tingkat pajak daerah yang lebih tinggi atau lebih rendah tidak selalu berpengaruh pada jumlah dana yang dialokasikan untuk belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah belum tentu diikuti oleh perubahan dalam pola alokasi anggaran pembangunan, terutama untuk belanja yang bersifat produktif seperti belanja modal.

4.5.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Dari hasil olah data regresi linear berganda data panel didapatkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.302084 > 1,99656$) dan nilai probabilitas Retribusi Daerah sebesar $0,0016 < 0,05$ dengan nilai koefisien Retribusi Daerah sebesar $0,251827$. Maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika nilai Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar satu persen, maka nilai Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar $0,251827$ persen.

Terjadinya peningkatan pendapatan dari retribusi memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran pembangunan termasuk belanja modal. Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk mendanai investasi pemerintah daerah dalam bentuk pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, serta aset-aset produktif lainnya. Ketika penerimaan dari retribusi daerah meningkat, pemerintah memiliki kemampuan keuangan yang lebih baik untuk merencanakan dan merealisasikan proyek-proyek pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian sejalan dengan teori Teori *Fiscal Federalism* menurut Oates (1972) yang menjelaskan bahwa pengelolaan retribusi daerah yang baik dapat mendorong peningkatan belanja modal. Penerimaan dari retribusi daerah yang dikelola secara optimal dapat dialokasikan ke sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan transportasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pengelolaan retribusi yang transparan dan akuntabel juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sehingga mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi daerah yang baik berkontribusi positif terhadap peningkatan belanja modal dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alpi, 2021) dan (Cahyanto dkk, 2023) menyatakan retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan retribusi daerah cenderung diikuti

oleh peningkatan belanja modal. Penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi penerimaan retribusi daerah, maka semakin besar pula belanja modal yang dialokasikan.

4.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap Belanja Modal

Pada hasil dari olah data regresi linear berganda data panel nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.858969 > 1,99656$) dan nilai probabilitas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar $0,0003 < 0,05$ dengan nilai koefisien Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar $0,260285$. Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami kenaikan sebesar satu persen, maka nilai Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar $0,260285$ persen.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik secara langsung dapat mendorong peningkatan belanja modal di daerah. Karena Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan salah satu instrumen transfer dari pemerintah pusat yang ditujukan secara spesifik untuk mendanai kegiatan pembangunan fisik di daerah. Alokasi dana ini biasanya diarahkan untuk proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana lainnya yang termasuk dalam kategori belanja modal. Semakin besar Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima, maka semakin besar pula kapasitas daerah dalam merealisasikan proyek-proyek belanja modal, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori *Fiscal Federalism* menurut Oates (1972) yang menyatakan bahwa dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas belanja modal guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih merata. Selain itu, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang tepat sasaran dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah, memastikan pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam jangka panjang.

4.5.4 Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap Belanja Modal

Pada hasil dari olah data regresi linear berganda data panel nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($10,47075 > 2,74371$) dengan nilai probabilitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar $0,00 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Solikin dan Saffana, 2023) serta (Zhafira & Sastri, 2023) yang menyatakan bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Dengan kata lain, sinergi antara sumber pendanaan lokal dan transfer dari pemerintah pusat dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan investasi jangka panjang. Pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang terpadu dan berorientasi pada pembangunan, di mana setiap komponen pendapatan diarahkan untuk mendukung belanja yang produktif. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.